

## **Belanja Daerah Baru 5 Persen Punya Anggaran Rp5 Triliun, Bupati: Jangan Tunda Lelang**



*Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Selasa,23/04/2024*

**Semua organisasi perangkat daerah di lingkup Pemkab Berau diminta untuk memaksimalkan penyerapan APBD tahun ini, sehingga penggunaannya tepat sasaran.**

**TANJUNG REDEB** – Realisasi pendapatan hingga April baru 10,8 persen. Sementara realisasi belanja daerah hanya 5,20 persen dari total APBD senilai Rp5 triliun. Jika tidak dikelola secara baik, dikhawatirkan terjadi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA).

“Ketika ada SiLPA tersebut, artinya kinerja ASN harus dipertanyakan dan harus digenjut lagi supaya lebih maksimal,” tegas Bupati Berau Sri Juniarsih saat memimpin apel pegawai kemarin (22/4).

Apabila terdapat kendala, ASN diminta berkoordinasi, sehingga, pembangunan segera diselesaikan. “Jika ada paket pekerjaan yang perlu dilelang, segera ajukan lelang. Terutama instansi yang memegang anggaran besar, seperti Dinas PU, Diskes, Disdik” ucapnya.

Ia menyoroti jalan-jalan kabupaten, baik di perkotaan maupun di kampung-kampung yang belum tersentuh APBD agar memaksimalkan kerja tim reaksi cepat (TRC) DPUPR untuk memperbaiki jalan, sembari menuntaskan jalan tersebut secara permanen.

Ditekankan juga kepada camat, kepala OPD, lurah atau kepala kampung hingga ketua RT untuk membantu merealisasikan penyerapan APBD. “Supaya semua lini yang terjauh dan terkecil bisa kita layani. Ini yang disebut dengan amanah. Yang menjadi tupoksi harus dimaksimalkan,” tegasnya.

Sebagai kepala daerah, diakuinya, tidak dapat bekerja sendiri. Tanpa kerja sama yang baik dengan OPD, program-program yang ada tidak dapat terlaksana. Kebutuhan dasar

masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan yang masih kurang akan dipenuhi bertahap.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Berau Mardiatul Idalisah mengatakan, dalam penyerapan anggaran tahun ini, pihaknya telah berkomitmen melaksanakan kegiatan sesuai petunjuk teknis dan kebutuhan sekolah-sekolah. Sesuai anggaran yang ada tentu akan dimaksimalkan.

“Kami akan menggunakan anggaran dengan efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tentunya apa yang menjadi kebutuhan sekolah akan direalisasikan secara bertahap,” ungkapnya. (\*[/aja/ind/k16](#))

#### **Sumber berita:**

1. Kaltimpost, Belanja Daerah Baru 5 Persen Punya Anggaran Rp 5 Triliun, Bupati: Jangan Tunda Lelang, 23/04/24

#### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019 diatur sebagai berikut:
  - (1) Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
  - (3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.
2. Dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf d PP 12/2019 diatur sebagai berikut:
  - (1) Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
  - (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah.